

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di KKP Attax *Consultant* mengenai penerapan program *e-Faktur* untuk pelaporan SPT Masa PPN sehubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di PT X, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait PPN yaitu :

1. Penerapan program *e-Faktur* untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada masa Januari hingga Desember 2018 telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Proses penginputan Faktur Pajak Keluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran bagi perusahaan agar dapat mempertahankan kepatuhannya dalam menerapkan program *e-Faktur* untuk pelaporan SPT Masa PPN maupun melakukan input Faktur Pajak Keluaran dan pajak Masukan, dan lebih ditingkatkan dengan cepat dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan SPT Masa PPN dari *klien* atau *suplier*.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., 2016, *Perpajakan*, Salemba Empat.
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana ES, 2017, *Perpajakan: Teori & Praktik*, Jakarta: Rajawali.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi
- Pohan, Chairil Anwar, 2017, *Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampain Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang.
- Waluyo, 2014, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.